

**EVALUASI PROGRAM RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA  
DALAM RANGKA REVITALISASI BANJIR KANAL BARAT  
(BKB ) KOTA SEMARANG**



**Skripsi**

**Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan  
Program Strata 1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan  
Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

**Penyusun :**

**M. Taufik Kurniawan**

**14010110120068**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**SEMARANG**

**2015**

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### Latar belakang

Merujuk pada peraturan daerah kota Semarang yaitu perda tentang pedagang kaki lima. Bisa kita ketahui semua problematika yang hampir terjadi di kawasan perkotaan di seluruh Indonesia khususnya di kota Semarang sendiri yaitu permasalahan pedagang kaki lima. Pedagang Kaki lima adalah Salah satu usaha dalam perdagangan atau salah satu wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan informal (Haryono, 1989). Dari kutipan buku diatas dapat diketahui bahwa pedagang kaki lima berdagang dengan menempati lahan-lahan yang dianggap strategis tanpa memikirkan kegunaan asli lahan tersebut. Sehingga dapat menimbulkan permasalahan. Seperti kawasan tersebut menjadi kotor karena jarang sekali ada pedagang yang mau membersihkan area tempat mereka berdagang, kedua jika mereka berdagang di sekitaran trotoar maupun bahu jalan hal tersebut akan mengakibatkan pejalan kaki direbut haknya dan lalu lintas jalan bisa tersendat lebih-lebih bisa mengakibatkan kecelakaan karena kurang waspada serta jalan menjadi sempit seperti yang terjadi di jalan Basudewo Kecamatan Semarang Tengah.

Jalan Basudewo yang letaknya berdekatan dengan BKB atau banjir kanal barat dijadikan sebagai lahan berjualan para pedagang karena dirasa sangatlah strategis karena menghubungkan dua jalan besar. Dengan adanya program induk yaitu normalisasi banjir kanal tersebut karena mengambil lahan bahu jalan alias bantaran kanal maka mau tidak mau mereka harus direlokasi. Pemerintah kota Semarang, pemerintah provinsi serta pihak swasta yang menerima tender untuk pengerjaan normalisasi tersebut merasa harus bertanggung jawab karena akan menggusur banyak kepala keluarga yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Untuk itulah para pedagang kaki lima di berikan sosialisasi secara bertahap agar mereka dapat dengan lapang dada untuk mau direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah kota. Lokasi yang dipilih karena dengan berbagai pertimbangan dari semua pihak maka di capailah kesepakatan bahwa yang menjadi tempat berjualan para pedagang yang direlokasi adalah pasar Kokrosono yang letaknya tidak jauh dari tempat semula dan di pasar Waru yang letaknya agak kedalam di kawasan Kaligawe Semarang Timur.

## **Rumusan masalah**

Dari berbagai permasalahan yang diutarakan dalam latar belakang diatas, maka rencana penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses relokasi pedagang kaki lima di bantaran Banjir Kanal Barat Kota Semarang ?
2. Faktor – faktor apakah yang menghambat dalam proses relokasi pedagang kaki lima bantaran Banjir Kanal Barat Kota Semarang ?

## **Tujuan Peneltian**

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengidentifikasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penanganan terhadap para pedagang kaki lima yang beraktifitas disekitar jalan basudewo yang akan terkena dampak proyek normalisasi banjir kanal barat.

## **Kerangka teori**

- Pedagang kaki lima

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Waworoentoe (1973 : 5) pedagang kaki lima biasanya akan tumbuh berkembang pada ruang-ruang fungsional kota (pusat perdagangan/pusat perbelanjaan/pertokoan, pusat rekereasi/hiburan, pasar, terminal/pemberhentian kendaraan umum, pusat pendidikan, pusat pertokoan).

- Pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 65 Tahun 2006, tentang Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menentukan pengertian pengadaan tanah adalah : “setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. ”

- Evaluasi Program

evaluasi kinerja kebijakan tersebut mengacu pada empat indicator pokok, yaitu indicator input, process, outputs dan outcomes (Brightman and Devis, 2000)

- Konsep Kebijakan

Menurut Thomas R. Dye memberikan pengertian kebijakan public sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

## **Metode Penelitian**

- Kualitatif diskriptif

metode penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. penelitian kualitatif jauh lebih subyektif dari pada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus. Teknik pengumpulan data kualitatif diantaranya adalah interview (wawancara).

## **Situs penelitian**

Penelitian akan di fokuskan pada pera pedagang yang telah direlokasi yang semula berjualan di sekitaran jalan basudewo yang bersebelahan langsung dengan kanal dan kini di pindahkan sesuai dengan barang yang diperjual belikan yaitu barang kecil di pasar kokrosono karena tempatnya atau lapaknya terbatas dan pasar waru yang tempatnya cukup luas untuk jenis barang yang besar.

## **Subyek penelitian**

Subyek dalam penelitian ini peneliti bagi menjadi tiga kelompok sasaran yakni Pedagang yang direlokasi, perwakilan pemerintah kota yaitu dinas pasar kota semarang, serta perwakilan pemerintah propinsi dan pusat yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana.

## **Sumber data**

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri lebih merujuk ke data yang dikumpulkan oleh peneliti yang berasal langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder sendiri penjelasannya ialah data yang diperoleh dari pihak maupun narasumber lain selain peneliti misalnya peneliti terdahulu serta instansi terkait permasalahan penelitian.

## **Analisis dan interpretasi data**

Analisis data ini berupa rangkaian kata-kata. Data ini dikumpulkan dari berbagai macam cara antara lain wawancara dan observasi yang kemudia diproses sebelum digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis). Dalam analisa data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yan terjadi secara bersamaan yaitu atau yang telah terkumpul untuk kemudian diolah menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut :

- Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

- Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

- Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya.

## **BAB II**

### **Gambaran Umum**

#### **Gambaran umum kota semarang**

Secara geografis Kota Semarang terletak pada posisi  $6^{\circ} 50'$  -  $7^{\circ} 10'$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ} 35'$  -  $110^{\circ} 50'$ . berdasarkan bentuk morfologinya, wilayah Kota Semarang secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Kota Semarang Bawah merupakan dataran rendah dan Kota Semarang Atas merupakan perbukitan. Pada dataran rendah struktur geologi berupa batuan endapan (alluvium) yang berasal dari endapan sungai yang mengandung pasir dan lempung. Sedangkan pada daerah perbukitan sebagian besar memiliki struktur geologi berupa batuan beku. Semarang sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah memiliki letak geografi yang sangat menguntungkan. Kota Semarang sebagai jalur lintas perekonomian dan mobilitas penduduk di Pulau Jawa yang nantinya dapat menjadi kota Metropolitan yang berbasis perdagangan dan jasa. Secara administrasi Kota Semarang merupakan daerah seluas  $\pm 37.360,947$  Ha dengan wilayah administrasi sebagai berikut : 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan.

#### **Topografi kota semarang**

Kota Semarang memiliki karakteristik topografi yang unik. Berada di ketinggian antara 0-348 meter diatas permukaan laut (dpl). Terbagi atas tiga kawasan yaitu pantai (0-5 meter dpl), kota bawah (5-100 meter dpl), dan kota atas (didas 100 meter dpl). Dari ketiga kawasan tersebut memiliki fungsi masing-masing yaitu pusat kota kawasan pantai sampai kota bawah memiliki fungsi sebagai pariwisata, pusat perdagangan, perkantoran dan permukiman. Sedangkan di kota atas memiliki fungsi sebagai kawasan pengembangan dan permukiman.

#### **Iklim**

Semarang memiliki musim dua seperti kebanyakan kawasan di Indonesia yaitu musim kemarau dan penghujan dengan pergantian selama 6 bulan dengan temperatur sekitar 25° C sampai 40° C. kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 62% sampai dengan 84%.

### **Keadaan Demografis**

#### **Jumlah penduduk**

Kepadatan penduduk di kota Semarang cenderung naik dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Diketahui bahwa penduduk Kota Semarang mengalami peningkatan rata-rata 1,4 % setiap tahunnya. Ditahun 2010 sendiri jumlah penduduk di kota Semarang ini mencapai angka 1.553.778 Jiwa dengan prosentasi penduduk laki-laki sebanyak 778.901 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 774.877 jiwa dengan prosentase laju pertumbuhan per tahun 2.01%.

#### **Kondisi Sosial dan Ekonomi**

##### Pendidikan

Angka pendidikan yang ditamatkan pada seluruh jenjang pendidikan di Kota Semarang baik itu SD, SLTP dan SLTA selam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari 90,97% di tahun 2005 menjadi 96,51% di tahun 2009. Sedangkan jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan SD, SLTP, SLTA dan Universitas juga mengalami peningkatan dari 1.291.294 di tahun 2005 menjadi 1.455.249 di tahun 2009.

##### ketenagakerjaan

Dari total penduduk usia kerja ( 15 tahun ke atas ), sekitar dua pertiga penduduk Kota Semarang termasuk dalam angkatan kerja

#### **Visi Misi Kota Semarang**

Dalam mewujudkan Visi “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa. Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera” ditempuh melalui 5 (lima) mision pembangunan daerah yakni diantaranya mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas, mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien meningkatkan kualitas pelayanan public, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah, Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

#### **Gambaran Umum Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana**

Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana adalah unit pelaksana teknis dibidang konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendali daya rusak air pada wilayah sungai yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, penyalahgunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.

### **Gambaran umum relokasi pedagang kaki lima**

Relokasi pedagang kaki lima sendiri di canangkan karena terdapat program pokok yaitu normalisasi banjir kanal barat. Otomatis dengan adanya program tersebut para pedagang yang berjualan di sekitaran kawasan jalan basudewo yang bersebelahan langsung dengan banjir kanal barat harus direlokasi. Pemkot sendiri memberikan pilihan 2 tempat berbeda untuk pedagang yang direlokasi yaitu pasar kokrosono dan pasar waru.

## **BAB III**

### **Pembahasan**

Bagaimana tingkat keberhasilan relokasi PKL dalam rangka program revitalisasi BKB (Banjir Kanal Barat) Kota Semarang ?

Proses perencanaan tata ruang, sering kali belum mempertimbangkan keberadaan dan kebutuhan ruang untuk PKL. Ruang-ruang kota yang tersedia hanya difokuskan untuk kepentingan kegiatan dan fungsi formal saja. Kondisi ini yang menyebabkan para pedagang kaki lima berdagang ditempat-tempat yang tidak terencana dan tidak difungsikan untuk mereka. Akibatnya mereka selalu menjadi obyek penertiban dan pemerasaan para petugas ketertiban serta menjadikan kota terkesan semrawut. Studi menunjukkan bahwa hampir disemua negara-negara Asia, PKL tidak mempunyai status legal dalam menjalankan usahanya dan mereka terus mendapatkan tindakan kekerasan oleh pemerintah kota dengan program yang mengatasnamakan penertiban atau penataan (bhowmik, 2005). Disisi lain, peran yang dijalankan sektor informal termasuk PKL belum sepenuhnya diterima pemerintah kota. PKL lebih dipandang sebagai aktifitas nonprofit. Karena tidak berkontribusi pada ekonomi lokal ataupun nasional melalui pajak.

Jumlah penduduk kota Semarang tahun 2012 sendiri sebanyak 1.559.198 jiwa dengan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 1.116.479 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk dengan usia produktif maka dibutuhkan pula banyak lapangan pekerjaan agar mereka yang menginjak usia produktif dapat mencari pekerjaan sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka capai. prosentase penduduk miskin Kota Semarang pada tahun 2012 dengan besaran 5,13% ini merupakan nilai presentase terendah di provinsi Jawa Tengah. Presentase perkembangan penduduk miskin Kota Semarang pada tahun 2008-2012

menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2008, prosentase penduduk miskin sebesar 6,00% turun menjadi 4,84% pada tahun 2009. Akan tetapi, terjadi peningkatan kembali pada tahun 2010 sebesar 0,28 % menjadi 5,12% dan sebesar 0,56% menjadi 5,68% ditahun 2011. Jika dilihat dari angka mutlak, jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Semarang pada tahun 2008 sebesar 89.617 jiwa dan pada tahun 2012 sebesar 81.900 jiwa.

Dewasa ini banyak sekali faktorr-faktor yang mempengaruhi suatu pekerjaan seseorang dan banyak sekali alasan yang mereka utarakan mengapa mereka memilih pekerjaan mereka saat ini. Salah satunya adalah pekerjaan sebagai pedagang kaki lima, sebenarnya banyak pendapat dari berbagai kalang yang berpendapat bahwa pedagang kaki lima merupakan sebuah pekerjaan dan tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa pekerjaan tersebut adalah sebuah pilihan atau sampingan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Diketahui bahwa pada tahun 2009 jumlah PKL sebanyak 11.414 dan pada tahun 2010 terus meningkat menjadi 12.000 PKL dan terus meningkat hingga 13.908 pada tahun 2013. prosentase penduduk miskin Kota Semarang pada tahun 2012 dengan besaran 5,13% ini merupakan nilai presentase terendah di provinsi Jawa Tengah. Presentase perkembangan penduduk miskin Kota Semarang pada tahun 2008-2012 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2008, prosentase penduduk miskin sebesar 6,00% turun menjadi 4,84% pada tahun 2009. Akan tetapi, terjadi peningkatan kembali pada tahun 2010 sebesar 0,28 % menjadi 5,12% dan sebesar 0,56% menjadi 5,68% ditahun 2011. Jika dilihat dari angka mutlak, jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Semarang pada tahun 2008 sebesar 89.617 jiwa dan pada tahun 2012 sebesar 81.900 jiwa.

Dengan banyaknya jumlah penduduk dengan usia produktif maka dibutuhkan pula banyak lapangan pekerjaan agar mereka yang menginjak usia produktif dapat mencari pekerjaan sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka capai. Dewasa ini banyak sekali faktorr-faktor yang mempengaruhi suatu pekerjaan seseorang dan banyak sekali alasan yang mereka utarakan mengapa mereka memilih pekerjaan mereka saat ini. Salah satunya adalah pekerjaan sebagai pedagang kaki lima, sebenarnya banyak pendapat dari berbagai kalang yang berpendapat bahwa pedagang kaki lima merupakan sebuah pekerjaan dan tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa pekerjaan tersebut adalah sebuah pilihan atau sampingan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pedagang kaki lima merupakan pekerjaan yang dilakukan secara mandiri. Kemandirian tersebut dikarenakan mereka yang mempunyai usaha tersebut menggunakan modal sendiri dan seadanya. Data yang diperoleh dari dinas pasar kota semarang sendiri dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 selalu mengalami peningkatan 5% per tahunnya. Di tahun 2009 sendiri jumlah pedagang di kota semarang sendiri mencapai



11.414 pedagang, sedangkan di tahun 2013 sendiri jumlah pedagang kaki lima yang tersebar di seluruh kawasan kota Semarang sendiri berjumlah 13.908 pedagang. Itu artinya dari tahun 2009 sampai 2013 dalam kurun waktu 4 tahun mengalami kenaikan sebanyak 2.394 pedagang, merupakan jumlah yang lumayan banyak untuk pekerjaan sekelas pedagang kaki lima mungkin dikarenakan tidak harus menggunakan ijazah untuk dapat berjualan akan tetapi dengan modal yang seadanya tergantung jenis usaha yang akan di jalani. Dari seluruh kawasan di kota Semarang persebaran pedagang yang paling banyak adalah di Semarang Tengah. Dikarenakan kawasan tersebut adalah pusat kota sekaligus pusat ekonomi kota. Dari data dinas pasar persebaran pedagang kaki lima di seluruh wilayah kota yang terbanyak ada di pusat kota dengan jumlah 2.539. Jumlah itu pun masih terbagi menjadi dua yaitu pedagang yang berjualan sesuai dengan SK Walikota sebanyak 1.742 dan yang tidak sesuai sebanyak 797. Sedangkan jumlah paling kecil yang di diami pedagang adalah kawasan Mijen yang berada di kawasan kota atas yang menjadi batas selatan dari kota Semarang dengan jumlah pedagang hanya sebanyak 19 pedagang saja.

Dengan adanya program induk yaitu normalisasi banjir kanal barat kota Semarang, pedagang kaki lima yang mendiami kawasan jalan Basudewo yang berdekatan langsung dengan kanal yang akan di normalisasi menjadikan kawasan berjualan para pedagang terancam terkena dampak normalisasi kanal tersebut. Alhasil, para pedagang kaki lima harus sukarela untuk di relokasi. Dengan adanya proyek tersebut maka para PKL yang berjualan di sekitar bantaran sungai tersebut di relokasi ke dua tempat berbeda yaitu ke pasar Kokrosono dan ke pasar Waru sesuai dengan barang dagangan yang diperjual belikan. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari bapak Abdul Haris Subadra, S.T selaku Kabid pembangunan waduk Jatibarang BBWS Pemali-Juana.

“Para PKL tersebut dipindahkan sesuai dengan barang dagangan mereka mas, untuk PKL yang jenis jualannya barang kecil pernak-pernik atau barang pecah belah itu ditempatkan di pasar kokrosono karena lapak berdagang yang disediakan sangatlah kecil hanya 2x3 meter sedangkan PKL yang berjualan seperti balok-balok kayu dan sejenisnya serta barang –barang dagangan yang tidak memungkinkan dijual di lapak kecil kita pindahkan ke pasar waru yang tempatnya lebih luas”.

Sebenarnya diketahui peneliti saat mewawancarai salah satu pedagang yang direlokasi lapak jualannya ke kawasan pasar kokrosono mengungkapkan bahwa beliau mau tidak mau harus direlokasi karena tempat berdagang mereka tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah kota Semarang untuk area berdagang. Terkait perlunya izin dari pemerintah kota terhadap lahan yang ditempati para PKL diperkuat dengan argument salah satu pedagang yang terkena dampak relokasi sebagai berikut :

“ ya kalau izin dari pemerintah sangatlah perlu mas, karena kita kan juga pengennya jualan ya dengan tenang tanpa adanya penertiban secara sepihak oleh satpol pp mas. Saya juga paham mas kalau tempat berdagang selama ini menempati lahan milik negara dan bersifat ilegal, akan tetapi dengan adanya kegiatan penarikan retribusi dari pihak dinas pasar maupun dari yang lain saya kira dengan itu jualan saya dianggap sah, ternyata tidak. Saya kan jualan disitu juga beli lahan dan lapak mas dari penjual sebelum saya, kalau ada pilihan yang diberikan oleh pemerintah kenapa tidak.”

Dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2000 pasal 7 ayat 5 yang menegaskan bahwa PKL diharuskan “ menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah”, ayat tersebut berkaitan langsung dengan Proyek yang telah dikerjakan Pemerintah Daerah yaitu Pemkot dengan bantuan dari beberapa sektor termasuk pemerintah propinsi, pusat serta terdapat pihak swasta yaitu JICA yaitu proyek normalisasi/revitalisasi banjir kanal barat kota semarang sebagaimana peruntukannya sebagai alat meminimalisir banjir yang kerap terjadi di kota Semarang kiriman dari wilayah Kabupaten semarang. Hal ini diperkuat dengan argument dari salah satu pihak yang di relokasi yaitu pedagang yang bernama pah Achmad R. sebagai berikut :

“Ya kalau pemberian tali asih atau saya menyebutnya bantuan langsung itu ya dari pihak pemerintah kota memberikan bantuan sebesar Rp. 500.000 per pedagang, selain itu ya cuman dikasih lapak di pasar Kokrosono dan pasar Waru mas. Sebelum di relokasi pemerintah juga menjanjikan memberi fasilitas pendukung seperti listrik dan air tapi nyatanya sampai saat ini saya membayar sendiri semua mas. Sebenarnya kami tidak butuh uang mas, berikan saja kami lapak yang rame maupun lumayan rame itu sudah cukup bagi kita karena dengan hal itu kami bisa memperjual belikan dagangan kami dan kami pun juga dapat memutar roda perekonomian kami mas. Nek dikasih uang kan paling gak ada seminggu habis buat keperluan sehari-hari apa lagi kalau pedagang yang telah beristri dan mempunyai anak itu kan tidak membantu mas. Apalagi di pasar Kokrosono juga sepi pembeli karena tempatnya tidak strategis dan lapaknya kurang menyita perhatian pembeli karena tempatnya tidak terbuka. Sampai saat inipun saya belum berjualan mas.”

#### **BAB IV**

##### **Kesimpulan**

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik beberapa kesimpulan yang dapat mewakili seluruh argumen yang tersusun di bab pembahasan sebagai berikut : proses relokasi pedagang kaki lima melibatkan Pemkot Pemprov serta pihak Swasta selaku pihak yang mengerjakan proyek, kedua proses relokasi berjalan lancar tanpa adanya bentrokan karena telah sesuai dengan kesepakatan bersama, dan yang terakhir ketiga setelah proses relokasi para pedagang mengeluh dengan tempat yang didapat karena sepi pengunjung dan tidak strategis alhasil mereka menjadi menganggur.

## Saran

Pertama pemerintah kota Semarang harus memikirkan lagi untuk mencari alternatif solusi tempat berdagang para pedagang, kedua jika hal tersebut tidak dimungkinkan untuk terwujud maka jalan lain adalah memberikan sebuah acara apapun itu yang bisa menarik minat masyarakat untuk datang berkunjung dan ditempatkan di dekat tempat relokasi agar pedagang dapat membuka kembali lapaknya. Dan yang terakhir adalah perlu adanya lembaga yang bisa menaungi para pedagang yang direlokasi agar komunikasi dengan pemerintah kota maupun pihak-pihak lain dapat dengan mudah terwakili.

## Daftar Pustaka

Riant Nugroho, 2009. **Public Policy**, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, Hal 83.

*Ibid*, Hal 84

Mas Roro Lilik Ekowati. 2009. **Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi kebijakan Atau Program (Suatu Kajian Teoritis Dan Pragtis)**, pustaka Cakra, Surakarta, Hal 5

Ismail Nawawi. 2009. **Public Policy-Analisis Strategi Advokasi Teori Dan Praktek**, Putra Media Nusantara, Surabaya, Hal 8-9

Irfan Islamy. 1994. **Kebijakan Public**, Universitas Jakarta Komunika, Jakarta, Hal 20

Ismail Nawawi. 2009. **Public Policy-Analisis Startegi Advokasi Teori Dan Praktek**, Putra Media Nusantara, Surabaya, Hal 131

Nugroho D, Riant. 2003. **Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi**, Pt. Elex Media Komputindo, Jakarta, Hal 158-162

Fadillah Putra. 2005. **Kebijakan Tidak Untuk Public**, Resist Book, Yogyakarta, Hal 57-59

Abdulkahar Badjuri Dan Teguh Yuwono. 2002. **Kebijakan Public Konsep Dan Setrategi**, Penerbit Ilmu Pemerintahan Fisip Undip, Semarang, Hal 113-114

AG Suharsono. 2006. **Analisis Kebijakan Public : Konsep Teori Dan Aplikasi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal 99

Riant Nugroho D. 2006. **Kebijakan Public Untuk Negara-Negara berkembang**, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, Hal 133

UURI Nomor 32 Tahun 2009. 2010. **Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, Pustaka Yutisis, Yogyakarta, Hal 7

Moleong Lexy J. 1999. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung :PT. Remaja Rosdakarya

Samsul Alam, Faried Ali. 2012. **Study Kebijakan Pemerintahan**. Jakarta: Refika Aditama

Hosio, J.E. 2007. **Kebijakan Public Dan Desentralisasi, Esai – esai Dari Sorong.**  
Yogyakarta. Laksbang

**Data Dinas Pasar :**

**Internet :**

[http://en.wikipedia.org/wiki/list\\_of\\_metropolitan\\_areas\\_in\\_indonesia](http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_metropolitan_areas_in_indonesia). Di unduh pada tanggal  
4 – 9 – 2014 Pukul 19.56

welcome to semarang.blogspot.com. diunduh pada tanggal 12 September 2014 Pukul 14.24

[www.pu.go.id/uploads/berita/ppw30309](http://www.pu.go.id/uploads/berita/ppw30309). di unduh pada tanggal 15 September 2014 Pukul  
15.30

di unduh dari <http://aldoranuary26.blog.fisip.uns.ac.ad>. di unduh pada hari selasa tanggal 1  
September 2014 Pukul 13.05

diunduh dari <http://csuryana.wordpress.com> pada tanggal 2 September 2014 Pukul 13.31

di unduh dari <http://dunia-penelitian.blogspot.com> hari Selasa tanggal 5 September 2014  
Pukul 13.43

di unduh dari <http://dunia-penelitian.blogspot.com> pada hari Selasa tanggal 9 September 2014  
Pukul 13.45